

ISSN 0251-286X

BULETIN PSP

Volume XVII. No. 1 April 2008



**Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Institut Pertanian Bogor**

**KELEMBAGAAN KEUANGAN PENGELOLAAN INDUSTRI
HASIL PERIKANAN TANGKAP DI INDONESIA**
(Finance Institution Management Towards Capture Fisheries in Indonesia)

Oleh :

Charles Bohlen Purba¹⁾, John Haluan²⁾, Domu Simbolon²⁾, Sugeng Hari Wisudo²⁾

Diterima tanggal: Desember 2007; Disetujui : 20 Maret 2008

ABSTRACT

Fisheries in Indonesia are dominated with micro, small and middle entrepreneurs (MSMEs), of fishery business. According to Investment Business Advisory Service (IBAS) research that there are 42 million units of micro, small and middle entrepreneurs in Indonesia in year 2005, and only 13% who could get banking access, 87% the rest rely on their own capital. The fact is that almost 99% businessman in Indonesia depend on MSMEs sector which could absorb at least 75 million employee, and supply commodities and services around 57%, and its contribution on gross national domestic product around 56.7%. Whereas for fisheries sector (which included in agriculture sector), the amount of MSMEs in 2005 are 24,7 million unit, but less access to banking capitals, mostly got lend of operational capital from broker and usurer. Therefore, it is need to conduct finance institution which have capitals to distribute those capitals to fisheries sector.

First field observation helded on March - April 2007, and the second on July - August 2007. Collecting data using interview method, direct observation to organizations and institutions that related with operating capital for catching fish and fish processing, such as finance institution, broker and usurer, cooperation scheme, profit and loss, beside economic, business and fisheries policies that have impact to fisheries in Indonesia. Data analysis that used are Maximum Sustainable Yield (MSY), Total Allowable Catch (TAC), Maximum Economic Yield (MEY), Catch Per Unit Effort (CPUE) dan Optimum Sustainable Yield (OSY) to analyse fish resource, market value analysis, cost and benefit analysis, Linear Goal Programming analysis, SWOT and Analytical Hierarchy Process (AHP).

Limited access to the financial institution capitals, especially from banks for marines, fisheries, and fish catching and processing industries in Indonesia. It is signed with just a little of financial institution which would gave their allowance and credit to fisheries industries. In the fact, few agreement cooperations between government and financial institutions not strong enough to develop national fisheries industries become stonger and competitor to the same industries from other asean countries, such as Thailand, Malaysia

¹ Kepala Bidang PA2 Kanwil XI Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan jakarta Email : v3lyna_caem@yahoo.com

². Staf Penagajar Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPIK-IPB.

dan Philipina. Therefore, it is needed makroeconomic policy that could actuating private sector, financial institutions and non financial institution to invest and developing marine and fisheries sector. Government could give some policies that interesting and facilitate all investors, and also conductive private sector to have role and become activator in marine and fisheries investment. Government has to assure of security and stability of investments, also all infrastructure and public utilities that related to the investments.

Key words : Finance institution, fisheries industries, small and middle entrepreneurs, banking, loans.

ABSTRAK

Kegiatan perikanan tangkap di Indonesia, hingga saat ini masih didominasi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), baik oleh nelayan penangkap maupun nelayan pengolah hasil tangkapan. Berdasarkan hasil penelitian dari *Investment Business Advisory Service* (IBAS) jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia pada tahun 2005 mencapai 42 juta unit. Hanya 13% saja yang mampu mengakses perbankan, sedangkan yang 87% mengandalkan modal sendiri. Padahal hampir 99% pelaku ekonomi di negeri ini bersandar pada sektor UKM yang menyerap lebih dari 75 juta tenaga kerja, menyediakan kebutuhan barang dan jasa hingga 57%, dan kontribusi terhadap produk domestik bruto mencapai 56,7%. Sedangkan untuk bidang perikanan (termasuk didaam kelompok pertanian) jumlah UKM pada tahun 2005 sekitar 24,7 juta unit, namun paling sedikit yang memiliki akses perbankan, lebih banyak yang mendapatkan modal kerja dari rentenir atau tengkulak. Sehingga diperlukan usaha untuk mendorong lembaga keuangan yang memiliki modal untuk lebih menyalurkan modalnya pada bidang pertanian, khususnya perikanan.

Penelitian lapangan pertama akan dilaksanakan pada bulan Maret - April 2007, dan penelitian lapangan kedua akan dilaksanakan pada Juli - Agustus 2007. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, pengamatan langsung, dan pengumpulan data dari instansi dan lembaga terkait, meliputi data sumberdaya ikan, data dari lembaga-lembaga keuangan perbankan dan non perbankan yang memberikan pinjaman atau kredit untuk industri perikanan tangkap, berupa besaran modal yang diberikan, skema kerjasamanya, nilai keuntungan yang didapatkan. Selain itu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga keuangan terait pembiayaan industri perikanan tangkap di Indonesia. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis potensi sumberdaya ikan yang meliputi *Maximum Sustainable Yield* (MSY), *Total Allowable Catch* (TAC), *Maximum Economic Yield* (MEY), *Catch Per Unit Effort* (CPUE) dan *Optimum Sustainable Yield* (OSY), Analisis Harga Pasar, Analisa Pengembalian Pinjaman/Kredit, Analisis Biaya dan Manfaat, Analisis *Linear Goal Programming*, SWOT dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Keterbatasan akses permodalan dari lembaga keuangan, terutama bank untuk sektor kelautan dan perikanan, khususnya industri hasil perikanan tangkap di Indonesia, ditandai dengan minimnya lembaga-lembaga keuangan yang mau memberikan pinjaman atau kredit kepada pelaku usaha industri perikanan. Kenyataannya beberapa kerjasama antara pemerintah dan lembaga keuangan nasional belum cukup kuat untuk membangun industri perikanan tangkap di Indonesia menjadi lebih kuat, dan mampu bersaing dengan industri yang sama dari negara tetangga, seperti Thailand, Malaysia dan Philipina. Sehingga perlu adanya kebijakan makroekonomi yang mampu menggerakkan sektor swasta dan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan untuk berlomba-lomba berinvestasi dan mengembangkan sektor ini, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mempermudah dan menarik para investor, baik dalam maupun luar negeri, kemudian mendorong pihak swasta untuk ikut ambil peran menjadi motor penggerak utama dalam berinvestasi pada sektor perikanan, dengan cara membuat regulasi atau deregulasi peraturan yang dapat mempercepat, mempermudah, memperjelas dan menjamin kegiatan investasi. Selain itu, pemerintah juga harus mampu menjamin kepastian hukum dan keamanan dalam jangka panjang, sehingga investasi yang ditanamkan dapat diproyeksikan dengan baik dalam jangka pendek, menengah ataupun panjang. Pemerintah juga harus mempersiapkan sistem informasi, data, serta sarana dan prasarana, baik berupa jaringan transportasi darat, udara dan laut yang aman, maupun jaringan komunikasi. Terakhir, pemerintah harus mampu membangun sistem pemantauan dan evaluasi kebijakan secara terus-menerus.

Kata kunci : Lembaga keuangan, industri perikanan tangkap, UKM, perbankan, pinjaman.

1. PENDAHULUAN

Sumberdaya ikan yang hidup di wilayah perairan Indonesia dinilai memiliki tingkat keragaman hayati (*bio-diversity*) paling tinggi. Sumberdaya tersebut paling tidak mencakup 37% dari spesies ikan di dunia (Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1994). Di wilayah perairan laut Indonesia terdapat beberapa jenis ikan bernilai ekonomis tinggi antara lain: tuna, cakalang, udang, tongkol, tenggiri, kakap, cumi-cumi, ikan-ikan karang (kerapu, baronang, udang barong/lobster), ikan hias dan kerang-kerangan termasuk rumput laut. Potensi sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,410 juta ton per tahun, yang terdiri dari perairan wilayah laut teritorial sekitar 4,625 juta ton per tahun dan perairan ZEEI sekitar 1,785 juta ton per tahun.

Tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan dari laut pada tahun 2002 telah mencapai sekitar 70% dari potensi lestari atau dengan produksi sebesar 4,5 juta ton. Tingkat pemanfaatan tersebut selain masih terbatas juga belum merata di seluruh wilayah perairan, bahkan beberapa jenis ikan di perairan-perairan tertentu utamanya perairan pantai (<12 mil) sudah intensif dan menunjukkan status "lebih-tangkap" (*overfishing*), seperti di Laut Jawa dan Selat Malaka.

Ikan tuna tergolong jenis *scombrid* yang sangat aktif dan umumnya menyebar di perairan yang oseanik sampai ke perairan dekat pantai. Pergerakan (migrasi) kelompok ikan tuna di wilayah perairan Indonesia mencakup wilayah perairan pantai, teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Keberadaan tuna di suatu perairan sangat bergantung pada beberapa hal yang terkait dengan spesies tuna dan kondisi hidro-oseanografi perairan. Pada wilayah perairan ZEE Indonesia, jalur migrasi jenis ikan tuna merupakan bagian dari jalur migrasi tuna dunia karena wilayah Indonesia terletak pada lintasan perbatasan perairan antara samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Migrasi kelompok tuna yang melintasi wilayah perairan pantai dan teritorial terjadi karena perairan tersebut berhubungan langsung dengan pengaruh perairan kedua samudera tersebut sehingga beberapa wilayah perairan pantai dan teritorial memiliki sumberdaya perikanan tuna yang besar.

Perairan umum yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 54 juta ha, dimana 13,3 juta ha diantaranya potensial untuk dikembangkan sebagai kegiatan pemacuan stok yang meliputi perairan danau, waduk dan sungai. Saat ini, potensi Sumber Daya Ikan (SDI) di perairan umum relatif masih rendah jika dibandingkan dengan potensi SDI di perairan laut, yakni hanya sebesar 0,9 juta ton per tahun. Namun demikian, menurut tim pemacuan stok dari LIPI dan BRKP tahun 2005, kegiatan pemacuan stok di wilayah perairan umum potensial sebesar 0,5 ton per ha, potensi perikanan tangkap di perairan umum dapat ditingkatkan menjadi 6,4 juta ton per tahun atau setara dengan nilai *Maximum Sustainable Yield* (MSY). Produksi ikan yang dihasilkan dari perairan umum pada tahun 2006 baru sebesar 301.150 ton (33,46 %) atau menurun rata-rata sebesar 0,78% dibandingkan tahun 2000 (318.334 ton). Dilihat dari total produksi perikanan tangkap tahun 2006 sebesar 4,769 juta ton, perairan umum hanya menyumbang sebesar 6,31%. Berpijak pada fakta inilah, DKP pada tahun 2007 akan melaksanakan

pemacuan SDI di perairan umum melalui sistem bisnis di 14 propinsi. Sistem ini dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi *overfishing* terhadap berbagai jenis kelompok SDI di perairan umum, meningkatkan produksi ikan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sebagai catatan, hingga tahun 2006, jumlah masyarakat yang bergerak dalam usaha perikanan di perairan umum sebanyak 365.790 unit, dan mengalami kenaikan rata-rata pada periode 2000 - 2006 sebesar 3,37%. Kondisi ini hendaknya merupakan peluang bisnis bagi pengusaha.

Salah satu hasil yang akan didapat dari kegiatan ini adalah peningkatan produksi tangkap dari perairan umum. Dengan kata lain, kegiatan penangkapan ikan di perairan umum dapat mendorong pencapaian peningkatan produksi perikanan sebesar 20% pada tahun 2009. Selain itu, bisnis di sektor ini juga dapat membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama nelayan di perairan umum yang jumlahnya hingga saat ini baru mencapai 541.280 orang tahun lalu. Adanya peningkatan produksi perikanan secara langsung juga dapat turut mendorong penyediaan lapangan kerja, kegiatan usaha bidang perikanan tangkap, penyediaan stok ikan dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan mereka.

Kegiatan perikanan di Indonesia, hingga saat ini masih didominasi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), baik oleh nelayan penangkap maupun nelayan pengolah hasil tangkapan. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari statistik perikanan pada tahun 2006 yang menunjukkan bahwa dari 412.497 unit armada perikanan yang digunakan oleh seluruh nelayan di Indonesia, sebanyak 375.108 unit armada atau 90,9% merupakan Perahu Tanpa Motor, Perahu Motor Tempel dan kapal motor yang berukuran dibawah 5 GT. Keadaan ini merupakan salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan karena produktivitas usaha yang dijalankan relatif rendah.

Berdasarkan hasil penelitian dari *Investment Business Advisory Service* (IBAS) jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia pada tahun 2005 mencapai 42 juta unit. Dari angka tersebut hanya 13% saja yang mampu mengakses perbankan, sedangkan yang 87% mengandalkan modal sendiri. Padahal hampir 99% pelaku ekonomi di negeri ini bersandar pada sektor UKM yang menyerap lebih dari 75 juta tenaga kerja,

menyediakan kebutuhan barang dan jasa hingga 57%, dan kontribusi terhadap produk domestik bruto mencapai 56,7%. Sedangkan untuk bidang perikanan (termasuk didaam kelompok pertanian) jumlah UKM pada tahun 2005 sekitar 24,7 juta unit, namun paling sedikit yang memiliki akses perbankan, lebih banyak yang mendapatkan modal kerja dari rentenir atau tengkulak. Sehingga diperlukan usaha untuk mendorong lembaga keuangan yang memiliki modal untuk lebih menyalurkan modalnya pada bidang pertanian, khususnya perikanan.

2. TUJUAN PENELITIAN

Kajian tentang penelitian ini antara lain :

- a) Terpetakannya lembaga-lembaga keuangan perbankan dan non perbankan yang ada di Indonesia, yang menyalurkan dan tidak menyalurkan pinjaman kepada sektor industri hasil perikanan tangkap.
- b) Adanya suatu analisa investasi yang obyektif terhadap sektor industri hasil perikanan tangkap.
- c) Adanya skema kerjasama yang oprimal untuk sektor industri hasil perikanan tangkap di Indoensia.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian lapangan pertama akan dilaksanakan pada bulan Maret - April 2007, dan penelitian lapangan kedua akan dilaksanakan pada Juli - Agustus 2007.

3.2 Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, pengamatan langsung, dan pengumpulan data dari instansi dan lembaga terkait. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder, data primer antara lain data sumberdaya ikan, data dari lembaga-lembaga keuangan perbankan dan non perbankan yang memberikan pinjaman atau kredit untuk industri perikanan tangkap, berupa besaran modal yang diberikan, skema kerjasamanya, nilai

keuntungan yang didapatkan. Selain itu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga keuangan terait pembiayaan industri perikanan tangkap di Indonesia. Sedangkan data sekunder adalah data atau referensi dari lembaga/instansi terkait dengan industri perikanan tangkap.

3.3 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.3.1 Analisis potensi sumberdaya ikan yang meliputi.

Maximum Sustainable Yield (MSY), Total Allowable Catch (TAC), Maximum Economic Yield (MEY), Catch Per Unit Effort (CPUE) dan Optimum Sustainable Yield (OSY). Adapun persamaan yang digunakan adalah :

$$X_{msy} = \frac{K}{2} \quad Y_{msy} = \frac{kr}{4} \quad E_{msy} = \frac{r}{2q}$$

$$CPUE_s = \frac{HT_s}{FE_s}$$

Dimana :

HT = Jumlah hasil tangkapan (*catch*) pada tahun ke *s*.

FE = Jumlah upaya penangkapan (*effort*) pada tahun ke *s*.

k = Daya dukung lingkungan

r = Laju pertumbuhan populasi

q = Koefisien daya tangkap dari alat penangkapan

3.3.2 Analisa Pengembalian Pinjaman/Kredit.

Untuk menganalisa kemampuan dan jangka waktu pengembalian modal yang dipinjamkan, sehingga modal yang dimiliki oleh lembaga keuangan tidak menjadi kredit macet (*non performance loan*).

3.3.3 Analisis Biaya dan Manfaat untuk menilai *fixed cost, variable cost, invisible cost* dan *price/biaya*

Analisis ini digunakan untuk membiayai industri perikanan tangkap dan besaran manfaat/keuntungan yang didapatkan. Analisisnya menggunakan formula *Net Present Value (NPV)*, Rasio Biaya-Keuntungan

(B/C Ratio) dan *Internal Rate of Return* (IRR). Adapun formula dari masing-masing adalah :

$$NPV = \sum_{t=0}^{t=n} \frac{B_t - C_t}{(1+i)^t}$$

Dimana:
 B_t = Total keuntungan hingga t tahun
 C_t = Total biaya hingga t tahun
 i = Besaran diskon
 t = Periode proyek

$$Net \quad B / C = \frac{\sum_{t=0}^{t=n} NPV \quad Positif}{\sum_{t=0}^{t=n} NPV \quad Negatif}$$

Dimana:
 B = Keuntungan
 C = Biaya
 i = Besaran diskon
 t = Periode proyek

$$IRR = i_1 + \frac{NPV \quad +}{(NPV \quad +) - (NPV \quad -)} (i_2 - i_1)$$

Dimana:
 i = Besaran diskon
 i_1 = Diskon pertama
 i_2 = Diskon kedua

3.3.4 Analisis *Linear Goal Programming* (LGP)

Analisis LGP bertujuan untuk menganalisis kebijakan dengan meminimumkan jarak antara (deviasi) target atau sasaran yang telah ditetapkan dengan hasil optimum berdasarkan syarat/ikatan (sumberdaya dan teknologi), termasuk kendala untuk mencapai tujuan. Analisis ini digunakan untuk menganalisa secara optimal kemampuan tiap institusi dalam melaksanakan visi dan misinya.

3.3.5 *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Analisa ini digunakan untuk menganalisis kebijakan yang digunakan untuk memilih prioritas dalam mengatasi konflik kepentingan yang terjadi di lokasi penelitian. Metode ini akan menganalisa fungsi dan tanggung jawab institusi dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.1 Industri Perikanan Tangkap

Sebagai negara maritim terbesar di Asia Tenggara dengan panjang pantai lebih dari 80.000 kilometer, Indonesia memiliki peluang besar menjadi negara produsen unggulan di bidang perikanan. Apalagi, perikanan merupakan urat nadi penghasilan bagi mayoritas penduduk di kawasan pesisir. Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) 2007, Indonesia menempati peringkat kelima dunia pada tahun 2004 sebagai produsen perikanan tangkap dan budidaya. Peringkat pertama adalah China, disusul Peru, Amerika Serikat, dan Cile. Produksi perikanan tangkap Indonesia pada 2007 berkisar 4,94 juta ton dan perikanan budidaya sekitar 3,08 juta ton yang menyumbang produk domestik bruto sekitar 3 %. Meski demikian, kiprah Indonesia masih tertinggal ketimbang negara tetangga dalam perdagangan internasional.

Di Asia, Indonesia hanya menduduki peringkat ke empat sebagai eksportir perikanan sesudah China, Thailand, dan Vietnam. Ekspor perikanan Vietnam kini sudah menembus 3 miliar dollar AS, sedangkan nilai ekspor perikanan Indonesia selama 2007 hanya 2,3 miliar dollar AS dengan pasar ekspor terbesar adalah AS, Jepang, dan Uni Eropa (UE). Pemerintah menargetkan nilai ekspor perikanan mencapai 3 miliar dollar AS pada 2009. Namun, belum lagi mencapai target ekspor itu, Indonesia dihadang persoalan serius dalam stok perikanan nasional. Stok perikanan pada 2007 berkisar 6,4 juta ton dengan pemanfaatan mencapai 5,8 juta ton (90,6%) atau melampaui batas pemanfaatan sebesar 80% dari total stok. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memperkirakan, Indonesia memasuki krisis ikan pada 2015 jika ekosistem tak diselamatkan. Persoalan ancaman stok perikanan itu ditengarai merupakan akumulasi dampak dari penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*), maraknya penangkapan ikan secara ilegal, dan perusakan ekosistem laut.

Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)/Perusahaan Perikanan Tangkap Tahun 2000 - 2006 (satuan : Unit)

Tahun	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Kenaikan Rata-rata
Perairan Laut	475.965	514.291	490.097	559.791	609.575	556.597	567.610	3,29
Perairan Umum	306.573	345.753	318.853	349.516	394.229	364.349	365.790	3,37

Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007

Tabel 2. Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap, 2000 – 2006 (satuan : Orang)

Tahun	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Kenaikan Rata-rata
Perairan Laut	2.486.456	2.562.945	2.572.042	2.311.821	2.346.782	2.057.986	2.060.620	-1,52
Perairan Umum	618.405	723.555	474.431	545.776	588.507	523.378	541.280	-0,40

Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007

Tabel 3. Produksi Perikanan Tangkap, 2000 – 2006 (satuan : Tons)

Tahun	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Kenaikan Rata-rata
Perairan Laut	3.807.191	3.966.480	4.073.506	4.383.103	4.320.241	4.408.499	4.468.010	2,74
Perairan Umum	318.334	310.240	304.989	309.693	330.880	297.369	301.150	2,55

Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007

Permintaan pasar dunia untuk konsumsi ikan akan terus menguat. Beberapa negara maju diperkirakan menjadi importir bersih produk perikanan pada 2030 dengan volume impor mencapai 21 juta ton. Pasar ekspor China juga dinilai potensial dengan konsumsi diprediksi naik dari 33 juta ton pada 1997 menjadi 53 juta ton pada 2020. Untuk menyingkahi peningkatan permintaan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan produksi perikananannya. Memang produksi perikanan tangkap meningkat dari tahun ke tahun kendati tidak terlalu besar. Pada tahun 2005 total produksi perikanan tangkap mencapai 4,705 juta ton, 2006 naik menjadi 4,769 juta ton, dan pada tahun 2007 menjadi 4,942 juta ton atau naik 3% dibanding tahun 2006. Rendahnya kenaikan produksi tersebut karena perikanan tangkap saat ini sifatnya pengendalian yang sudah ada, sebab hasil penangkapan selama ini sudah hampir mendekati batas penangkapan yang diperbolehkan.

Kendala terbesar pada peningkatan produksi adalah kurangnya peningkatan teknologi, perluasan pasar dan biaya operasional yang tinggi, terutama bahan bakar yang mencapai 60% biaya produksi. Untuk itu diperlukan bantuan dari berbagai pihak untuk menyediakan modal usaha

atau modal operasional yang meringankan nelayan dalam penggunaan sebelum dan setelah produksi. Mengingat masih banyak lembaga keuangan yang membatasi kredit atau penyaluran modal bagi usaha bidang perikanan, terutama perikanan tangkap.

Industri perikanan tangkap skala kecil dan menengah memang menghadapi banyak permasalahan. Secara umum dapat diangkat 4 (empat) faktor yang sangat dominan mempengaruhi keberhasilan upaya pengembangan industri perikanan tangkap skala kecil (tradisional) ini, yakni :

1) Pemasaran

Produk perikanan mudah rusak dan tidak tahan lama (*high perishable*), sehingga pelaku industri perikanan tangkap skala kecil dan menengah selalu berada pada posisi sulit untuk berkembang akibat harga jual produk yang diterima sangat rendah dan cenderung tidak sebanding dengan resiko maupun biaya yang telah dikeluarkannya.

2) Produksi.

Industri perikanan tangkap di laut sangat berbeda dengan bidang-bidang lainnya. Industri perikanan tangkap di laut relatif lebih sulit diprediksi keberhasilannya karena sangat peka terhadap faktor eksternal (musim dan iklim) serta faktor internal (teknologi, sarana dan prasarana penangkapan ikan dan modal). Kerentanan dalam proses produksi akan mengakibatkan adanya fluktuasi dalam perolehan hasil tangkapannya.

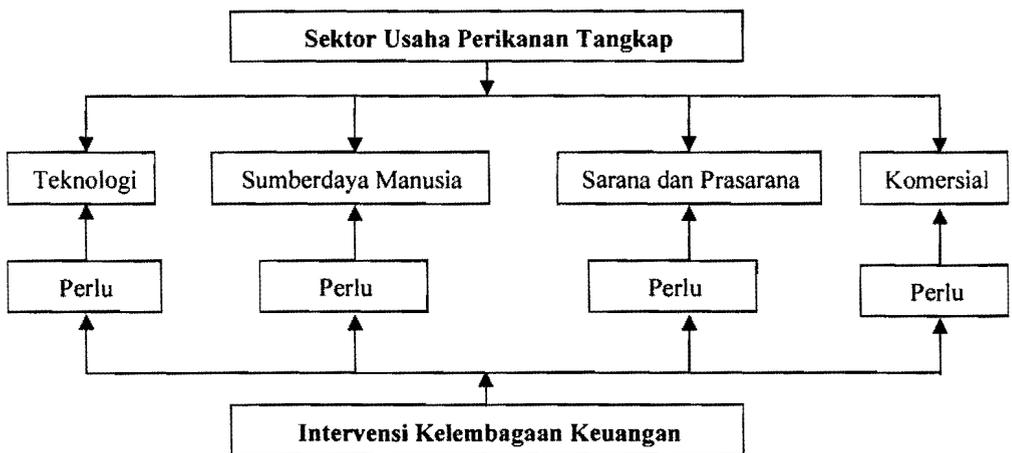
3) Organisasi.

Kelembagaan dalam pengelolaan industri perikanan tangkap skala kecil dan menengah masih berada dalam taraf mencari bentuk kelembagaan yang tepat di dalam mengelola sumberdaya, baik ditinjau dari aspek aturan main (*property rights*) maupun organisasi. Konsekuensi dari organisasi dan aturan main yang belum kuat tersebut memberikan dampak pada lemahnya posisi usaha skala kecil ini dalam melakukan negosiasi kepada pihak lain. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka menguatkan aspek organisasi ini, sehingga timbul adanya pola-pola kemitraan antara pelaku usaha skala kecil dengan mitranya. Namun kebanyakan program pengembangan tersebut berjalan relatif tidak lancar.

4) Keuangan dan Permodalan.

Salah satu isu masalah pokok yang krusial dan selalu menjadi momok pada industri perikanan tangkap skala kecil dan menengah adalah permasalahan keuangan dan permodalan. Keterbatasan sumber modal ini bukan disebabkan oleh karena tidak adanya lembaga keuangan dan kurangnya uang beredar, namun disebabkan oleh karena tidak beraninya lembaga keuangan berkecimpung pada kegiatan usaha ini. Kondisi tersebut memang beralasan (bila ditinjau dari sisi ekonomi) karena kegiatan usaha penangkapan ikan skala kecil (tradisional) ini diperparah oleh ketidakpastian dalam memperoleh hasil tangkapannya. Sangat wajar apabila lembaga keuangan menghindari rasa ketakutan yang besar terhadap resiko kredit macet. Dalam kasus seperti ini biasanya lembaga keuangan menetapkan syarat agunan (*collateral*) yang tinggi dan sulit untuk dapat dipenuhi oleh para pelaku usaha penangkapan ikan skala kecil (tradisional).

Eratnya keterkaitan pengembangan usaha perikanan tangkap di Indonesia dengan lembaga keuangan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Skema hubungan lembaga keuangan dengan usaha perikanan tangkap dan komponen-komponennya.

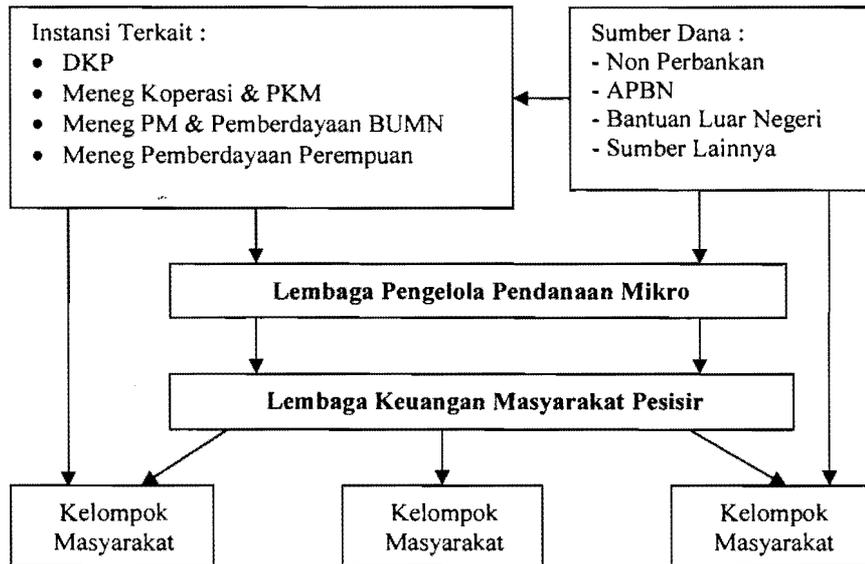
4.1.2 Sumber-Sumber dan Model-Model Pendanaan Usaha Bagi Industri Perikanan Tangkap

Sumber pendanaan untuk industri perikanan tangkap hingga saat ini telah banyak dikenal, yakni :

- 1) Perbankan : Skim Komersial, Skim Syariah, Skim Kredit Program Bersubsidi
- 2) Non Perbankan : Keuntungan BUMN, Modal Ventura, Permodalan Nasional Madani.
- 3) APBN
- 4) Bantuan Luar Negeri
- 5) Sumber lainnya terdiri : Individu, Koperasi, Perusahaan, Yayasan, Bursa Efek, Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan dan Swadaya Masyarakat.

Adapun mekanisme penyaluran pendanaan dan pembinaannya selain sumber perbankan secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Dana disalurkan melalui instansi terkait atau langsung kepada lembaga pengelola dana mikro, yaitu sebuah organisasi yang bersifat nirlaba, berbadan hukum dan memenuhi semua persyaratan sesuai peraturan yang berlaku serta berpengalaman di bidang pengelolaan penyaluran pendanaan mikro dan pengembangan masyarakat; atau langsung disalurkan melalui Lembaga Keuangan Masyarakat Pesisir setempat, yaitu unit lapangan dari Lembaga Pengelola Dana Mikro.
- 2) Kemudian dana tersebut disalurkan pada kelompok masyarakat yang terdiri dari 5 (lima) anggota, dimana setiap anggota tidak diperbolehkan memiliki hubungan keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan skema berikut :



Gambar 2. Skema penyaluran pendanaan dan pembinaannya selain sumber perbankan

Bagi sumber pendanaan yang berasal dari perbankan, mekanisme penyaluran pendanaannya mengikuti prosedur standar komersial dimana calon nasabah dapat memperoleh informasinya di kantor perwakilan bank yang bersangkutan. Hingga saat ini, model-model pendanaan untuk industri perikanan tangkap, terutama nelayan tradisional yang telah direalisasikan adalah sebagai berikut :

1) Grameen Bank

Grameen Bank adalah model pendanaan skala kecil untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat pesisir (termasuk didalamnya industri perikanan tangkap skala kecil) melalui penyediaan modal, pembinaan usaha secara kontinyu dan intensif, dan pendampingan berkelanjutan yang mandiri.

2) Model Pembinaan Usaha Kecil oleh BUMN

Model pembinaan usaha kecil oleh BUMN adalah sebuah model pembinaan dengan memanfaatkan dana dari bagian laba BUMN,

dimana pembinaannya dapat berupa pendidikan, kemampuan kewirausahaan, manajemen serta keterampilan teknis produksi termasuk juga pinjaman modal kerja dan investasi, jaminan kredit, pemasaran dan promosi hasil produksi serta bantuan penyertaan. Misalnya Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa: (i) kebijakan memberikan sebagian laba (keuntungan) BUMN (1-5%), dan (ii) kebijakan alokasi subsidi non BBM. Bahkan telah dikembangkan lembaga keuangan mikro dengan menerapkan sistem kredit komersial pada tingkat bunga yang serendah mungkin, dimana pemerintah dapat berperan sebagai penjamin dan pembina teknis, sementara pihak perbankan berperan dalam penyediaan modal dan pembinaan manajemen keuangan dan organisasi.

3) Model Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, dimana terjadi proses pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Misalnya, sejak tahun 2000 Pemerintah juga menerapkan sistem dana bergulir dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Pesisir (PEMP) yang bukan bersifat *charity* (hadiah), tetapi lebih diarahkan untuk *empowerment* (pemberdayaan), sehingga diharapkan dapat terus berkembang dan menyentuh sebagian besar masyarakat pesisir/nelayan. Selain itu ada juga dana bergulir dari pemerintah yang dikelola oleh Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir (LEPP), yang disampaikan langsung kepada masyarakat pesisir/nelayan sebagai *stakeholders* utama dengan fokus pada peningkatan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, berbasis pada sumber daya lokal, berorientasi pada masa depan dan berkelanjutan, serta bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan lokal yang bersifat partisipatif. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, telah dibentuk kelembagaan usaha berupa Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) sebagai embrio badan usaha untuk membantu pengembangan usaha produktif masyarakat pesisir. Sebagian besar LEPP masih berfungsi sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang kegiatannya terbatas pada perguliran dana produktif yang

dialokasikan pemerintah. Dalam hal ini pihak Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menggandeng PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan Pemerintah Daerah, untuk memperkuat dan merevitalisasi LEPP menjadi bank pesisir yang mengakar dan berlandaskan keswadayaan masyarakat yang berkelanjutan.

4.1.3 Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah

Secara umum, ada dua tugas utama pemerintah dalam mengembangkan sektor perikanan, yaitu pertama, secara mikro membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan modal yang berasal dari APBN dan APBD, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan dapat pula berupa sarana dan prasarana produksi. Sedangkan secara makro adalah meningkatkan investasi/pemodalan pada sektor perikanan, melalui kebijakan-kebijakan yang mempermudah dan menarik para investor, baik dalam maupun luar negeri. Di samping itu, pemerintah perlu mendorong pihak swasta untuk ikut ambil peran menjadi motor penggerak utama dalam berinvestasi pada sektor perikanan, dengan cara membuat regulasi atau dereulasi peraturan yang dapat mempercepat, mempermudah, memperjelas dan menjamin kegiatan investasi. Selain itu, pemerintah juga harus mampu menjamin kepastian hukum dan keamanan dalam jangka panjang, sehingga investasi yang ditanamkan dapat diproyeksikan dengan baik dalam jangka pendek, menengah ataupun panjang. Pemerintah juga harus mempersiapkan sistem informasi, data, serta sarana dan prasarana, baik berupa jaringan transportasi darat, udara dan laut yang aman, maupun jaringan komunikasi. Dan yang terakhir, pemerintah harus mampu membangun sistem pemantauan dan evaluasi kebijakan secara terus-menerus.

4.1.4 Peran Pemerintah dalam Mengakses Sumber Pendanaan Bagi Kegiatan Sektor Perikanan dan Kelautan

DKP telah menjalankan beberapa program pemberdayaan melalui bantuan stimulan berupa sarana dan prasarana produksi atau modal kerja untuk meningkatkan kemampuan usaha yang masih dalam potensial pasif (memiliki keahlian dan kelayakan tapi tidak memiliki modal, sarana dan prasarana) atau potensial aktif (memiliki keahlian dan kelayakan, serta memiliki modal, sarana dan prasarana yang terbatas). Umumnya usaha

perikanan kecil dan menengah bergerak dalam bidang penangkapan ikan, budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya secara tradisional.

4.1.5 Sumber dari Lembaga Keuangan Non-Bank

Beberapa ahli perikanan menyakan bahwa pembiayaan sektor perikanan seyogianya dilakukan oleh lembaga khusus keuangan yang bukan bank, seperti koperasi simpan pinjam. Sebab jika hanya mengandalkan perbankan, akan sulit bagi perikanan rakyat untuk mendapatkan akses pembiayaan karena semua persyaratan perbankan harus dipenuhi.

Seperti kita ketahui bahwa perbankan belum tertarik untuk bergerak di pembiayaan sektor perikanan. Hal ini semata-mata karena kurangnya daya tarik sektor perikanan, antara lain karena tidak cepat menghasilkan, risiko tinggi oleh faktor alam, produknya cepat rusak/busuk, dan memerlukan peralatan yang banyak dan mahal. Namun untuk mengatasi masalah tersebut prinsipnya sederhana, ada gula ada semut. Pemerintah harus membuat sektor perikanan menarik bagi lembaga keuangan, pelaku, maupun investor. Malaysia dan Thailand berhasil melakukan itu, mereka telah bisa mengendalikan risiko-risiko yang ada dengan teknologi. Pemerintah dapat membantu menciptakan daya tarik perikanan dengan mengembangkan infrastruktur perikanan, memberikan insentif bagi investor yang masuk ke sektor perikanan, dan memberikan kepastian usaha. Oleh karena itu, Pemerintah harus merevitalisasi Departemen Kelautan dan Perikanan karena lembaga tersebut yang bertanggung jawab dalam urusan sumber daya manusia, teknologi perikanan, data stok sumberdaya perikanan, dan perizinan. Sehingga Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan pada sektor perikanan, bahwa sektor perikanan akan mempengaruhi pada kebijakan makroekonomi negara ini.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan pemerintah sektor Perikanan dan kelautan melalui Departemen Kelautan dan Perikanan untuk membantu pembiayaan usaha perikanan kecil dan menengah bergerak dalam bidang penangkapan ikan, budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya secara tradisional, antara lain :

- 1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang bertujuan untuk membantu kelompok usaha mikro, kecil dan menengah pada sektor perikanan di wilayah pesisir. Program ini untuk memberikan stimulasi dalam aspek pemodal, namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro. Esensi program ini adalah membangun lembaga keuangan mikro untuk menopang usaha dan berbisnis secara lebih maju dan profesional. Pada tahun 2006 DKP mengucurkan dana sebesar Rp 132,4 miliar untuk program ini. Dana tersebut digunakan untuk 3 (tiga) program utama, yakni; (1) Penguatan modal di 111 kabupaten/kota, (2) Pembangunan fasilitas kedai pesisir di 53 kabupaten/kota dan (3) Pembangunan *Solar Packed Dealer* untuk Nelayan (SPDN) di 51 kabupaten/kota.
- 2) Program Optimalisasi Penangkapan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran (OPTIKAPI) yang memiliki sasaran nelayan yang memiliki usaha mikro dan kecil. Program ini diarahkan untuk memberikan bantuan sosial (grant) dalam bentuk natura (sarana produksi) sehingga nelayan mampu mengembangkan usahanya lebih mandiri dan tidak hanya berusaha untuk usaha yang berdifat persisten.
- 3) Program Skim Modal Kerja diberikan kepada pelaku usaha mikro (skala rumah tangga) dalam bidang pengolahan hasil perikanan, pemasaran dan pembudidayaan. Esensi program ini adalah untuk mempersiapkan UMK dalam berhubungan dengan sumber modal, baik perbankan maupun nonperbankan dalam upaya mengembangkan usahanya.
- 4) Program Konsultan Keuanga Mitra Bank (KKMB) Perikanan yang dibentuk berdasarkan kerjasama antara DKP dengan Bank Indonesia pada tahun 2003, yang memiliki tujuan mencetak konsultan keuangan yang mandiri dan profesional dalam membantu UMKM yang kesulitan dalam mengakses dana perbankan. Hingga saat ini DKP telah menghasilkan sebanyak 549 kader yang menyebar di 23 propinsi. Dari hasil pemantauan di 11 propinsi yang melaksanakan program ini, telah mampu membuat dan memfasilitasi sebanyak 257 proposal dan disetujui sebanyak 187 dengan nilai Rp. 10,1 milyar. Selama periode 2004, investasi baru di sektor kelautan dan perikanan yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) hanya sebesar US \$ 132,6 juta atau setara dengan Rp. 1,326 trilyun. Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) sebesar Rp. 3 milyar, sedang investasi yang bersumber dari perbankan diperkirakan sebesar Rp. 6,41 trilyun.

4.1.6 Sumber dari Lembaga Keuangan Perbankan

Pemerintah melalui DKP juga membangun kerjasama dengan beberapa bank nasional untuk membiayai kegiatan perikanan di Indonesia. Melalui kerjasama tersebut, tersedia sejumlah pinjaman atau kredit khusus yang dialokasikan bagi sektor kelautan dan perikanan, yang merupakan bagian dari kredit Pembinaan Kemitraan Bina Lingkungan, kredit umum untuk investasi, modal kerja, dan kredit ekspor dari masing-masing bank. Rincian kerjasama tersebut adalah:

1) Kerjasama dengan Bank Mandiri

Kerjasama ini lebih dikenal dengan Kredit Mina Mandiri, yang dimulai pada 27 Maret 2003 dengan alokasi dana yang disiapkan senilai Rp. 3 triliun dan dialokasikan untuk pengusaha perikanan tangkap terpadu di wilayah Indonesia Bagian timur .

2) Kerjasama dengan Bank BNI

Kerjasama ini lebih dikenal dengan Kredit Bahari yang memberikan pelayanan kepada usaha pengolahan hasil perikanan tangkap, pemasaran dan industri wisata bahari. Realisasi kredit PT. Bank BNI ke sektor Kelautan dan perikanan sampai dengan periode 31 Desember 2004 sebesar Rp. 332,083 milyar dengan rincian, sebagai berikut :

- a) Pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil sebesar Rp. 120,790 milyar yang terdiri dari :
 - Usaha perikanan Rp. 87,938 milyar,
 - Sarana usaha perikanan Rp. 2,168 milyar,
 - Industri pakan ikan Rp. 27,418 milyar
 - Lain-lain Rp. 3,266 milyar.
- b) Sedangkan pembiayaan untuk usaha menengah sebesar Rp. 211,293 milyar yang terdiri dari :
 - Usaha perikanan Rp. 64,680 milyar
 - Sarana usaha perikanan 0
 - Industri pakan Rp. 12,579 milyar
 - lainnya Rp. 134,034 milyar

3) Kerjasama dengan Bank BRI

Kerjasama dengan bank BRI diprioritaskan pada pengembangan usaha perikanan skala mikro, kecil dan menengah, yang berada di daerah pedesaan untuk nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran. Untuk sektor perikanan tangkap, pada tahun 2005 BRI telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp. 5 milyar.

4) Kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri

Bagi para pelaku usaha yang tidak setuju dengan model kredit, maka Bank Syariah Mandiri menyediakan pembiayaan model syariah. Penyaluran pembiayaan ini lebih diarahkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dialokasikan untuk kegiatan usaha mikro dan kecil, baik untuk budidaya, pengolahan, penangkapan dan pemasaran ikan. Sampai dengan periode Desember 2004 PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) telah menyalurkan pembiayaan untuk pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 160,723 milyar, dengan rincian: (1) usaha prasarana perikanan dan lainnya sebesar Rp. 145,204 milyar, (2) industri perikanan sebesar Rp. 12,553 milyar, (3) usaha perikanan sebesar Rp. 2,904 milyar.

5) Kerjasama dengan Bank Muamalat

Kerjasama dengan Bank Muamalat ditujukan untuk pelaku usaha mikro dan kecil, namun kebanyakan sumber pendanaannya adalah investasi dari Timur Tengah yang tertarik untuk berinvestasi di bidang kelautan dan perikanan.

6) Kerjasama dengan Bank Danamon

Kerjasama ini diarahkan untuk membantu kegiatan usaha perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan tradisional. Kerjasama ini melatih pembudidaya, pengolah tradisional, dan nelayan penangkap untuk bertransaksi melalui perbankan, disamping juga mendapatkan pinjaman atau kredit.

7) Kerjasama dengan Bank Bukopin

Kerjasama ini tertuang dalam Program Swamitra Mina yang merupakan sumber pembiayaan alternatif bagi masyarakat pesisir. Program ini membuka peluang bagi masyarakat pesisir dalam mengakses sumber pembiayaan yang selama ini sangat sulit diperoleh masyarakat pesisir dari Lembaga keuangan yang ada.

Cikal bakal pelaksanaan program Swamitra Mina bermula dari program PEMP. Pada tahun 2004 program PEMP mendapat kucuran dana sebesar Rp. 140 milyar untuk mengakomodir 160 kabupaten/kota. Adapun pagu untuk Dana Ekonomi Produktif (DEP) yang digunakan sebagai penguatan modal sebesar Rp. 98.347.592,000 yang dikelola melalui LKM Swamitra Mina, BPR-Pesisir, dan USP. Adapun jumlah LKM Swamitra Mina yang ada saat ini sebanyak 139 buah yang kesemuanya adalah Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan yang telah berbadan hukum. Dengan status berbadan hukum, maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan yang mensyaratkan bahwa untuk menyerap dana masyarakat dan memberikan pinjaman kepada masyarakat hanyalah lembaga perbankan dan koperasi yang berbadan hukum.

8) Kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia

Kerjasama ini dilakukan sejak tahun 2001, yaitu melalui penyaluran kredit Ketahanan pangan (KKP) sektor kelautan dan perikanan senilai Rp. 44,529 milyar. Kredit ini merupakan kredit komersial biasa, hanya saja nelayan mendapat subsidi bunga dari pemerintah sebesar 4% - 4,5% per tahun. Kredit tersebut dialokasikan bagi usaha mikro dan kecil untuk nelayan penangkap, pembudidaya, pengolah tradisional dan pemasar hasil produksi perikanan.

5. KESIMPULAN

Keterbatasan akses permodalan dari lembaga keuangan, terutama bank untuk sektor kelautan dan perikanan, khususnya industri hasil perikanan tangkap di Indonesia, ditandai dengan minimnya lembaga-lembaga keuangan yang mau memberikan pinjaman atau kredit kepada pelaku usaha industri perikanan. Pemerintah, melalui Departemen Kelautan dan perikanan selama ini berusaha untuk membuka jalur kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan untuk membiayai kegiatan perikanan dan kelautan, yang selama berkuasanya Orde Baru sangat sulit mendapatkan pinjaman atau kredit. Terbukti, DKP telah mampu mendapatkan kerjasama dengan pihak bank dan non bank untuk pembiayaan kegiatan sektor kelautan dan perikanan, yang nilainya saat ini mencapai triliunan rupiah.

Kenyataannya kerjasama-kerjasama tersebut belum cukup kuat untuk membangun industri perikanan tangkap di Indonesia menjadi kuat, dan mampu bersaing dengan industri yang sama dari negara tetangga, seperti Thailand, Malaysia dan Philipina. Tentunya pemerintah harus memiliki tekad yang kuat dan dilaksanakan dengan baik melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya, agar sektor kelautan dan perikanan yang menyerap jutaan tenaga kerja dapat berkembang secara terpadu dan mampu menyaingi negara-negara lain. Kebijakan makroekonomi yang dikeluarkan pemerintah saat ini belum mampu menggerakkan sektor swasta dan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan untuk berlomba-lomba berinvestasi dan mengembangkan sektor ini, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mempermudah dan menarik para investor, baik dalam maupun luar negeri, kemudian mendorong pihak swasta untuk ikut ambil peran menjadi motor penggerak utama dalam berinvestasi pada sektor perikanan, dengan cara membuat regulasi atau dereulasi peraturan yang dapat mempercepat, mempermudah, memperjelas dan menjamin kegiatan investasi. Selain itu, pemerintah juga harus mampu menjamin kepastian hukum dan keamanan dalam jangka panjang, sehingga investasi yang ditanamkan dapat diproyeksikan dengan baik dalam jangka pendek, menengah ataupun panjang. Pemerintah juga harus mempersiapkan sistem informasi, data, serta sarana dan prasarana, baik berupa jaringan transportasi darat, udara dan laut yang aman, maupun jaringan komunikasi. Terakhir, pemerintah harus mampu membangun sistem pemantauan dan evaluasi kebijakan secara terus-menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Tri Cahyono. 1995, *Manajemen Strategi Pemasaran*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Program Magister Manajemen. Badan Penerbit IPWI, Jakarta.
- , 1996, *Manajemen strategi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI. Program Magister Manajemen. Badan Penerbit IPWI, Jakarta.
- Depkominfo, 2007, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)*, <http://www.depkominfo.go.id/>

- DKP, 2004, Bangkitnya Industri Tuna Nasional, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1004/21/cakrawala/penelitian.htm>
- , 2004, Swamitra Mina Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Masyarakat Pesisir, <http://www.dkp.go.id/content.php?c=1326>
- , 2005, SWA MITRA MINA: Lokomotif Permodalan Masyarakat Pesisir, <http://www.dkp.go.id>
- , 2006, Juklak Pola Bergulir Paket OPTIKAPI (Pembinaan OPTIKAPI), <http://www.dkp.go.id/content.php?c=2539>
- , 2005, PERIKANAN TANGKAP INDONESIA (Suatu Pendekatan Filosofis dan Analisis Kebijakan), <http://www.dkp.go.id/content.php?c=1823>.
- Fandy Tjiptono, 1995, Strategi Pemasaran. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Kompas, 2003, Mampukah Indonesia Jadi Pemain Utama di Pasar Dunia?, <http://www.kapet.org/articles/articledetail.asp?id=22>
- , 2005, Pembiayaan Seyogianya Diserahkan pada Lembaga Non-bank, <http://kompas.com/kompas-cetak/0507/26/ekonomi/>
- Kotler P. 1997, Manajemen Pemasaran. Marketing Management 9 e. Analisis Perencanaan Implementasi dan Kontrol. Simon & Schuster (Asia) Pte. Ltd..
- Kotler P., dan Gary Armstrong, 1997, Dasar-Dasar Pemasaran. Principle of Marketing 7 e. Jilid I. Simon & Schuster (Asia) Pte. Ltd.
- Pearce dan Robinson. 1997, Manajemen Strategik. Formulasi, Implementasi dan Pengendalian, Alih Bahasa. Bina Aksara, Jakarta.
- Supranto J. M. A. 1991, Metode Riset. Aplikasinya Dalam Pemasaran. Penerbit PT. RINEKA CIPTA, Jakarta.
- , 1994, Ekonomi, Manajemen dan Pemasaran Berwawasan Internasional/Global. Kumpulan Tulisan Naskah. Badan Penerbit IPWI, Jakarta.
- Wee Chow Hou, 1997, Practical Marketing : An Asia Prespective, Pemasaran Praktis Cara Asia. Penerbit Mega Asia.